

**KEBANGKITAN DAN KEMUNDURAN DINASTI POLITIK  
IRIANTO MS SYAFIUDDIN DI KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2000 – 2018**

**Danu Harja\*) Dewi Erowati\*\*) Wijayanto\*\*)**

Email: [danuharja086@gmail.com](mailto:danuharja086@gmail.com), [dewi.erowati@live.undip.ac.id](mailto:dewi.erowati@live.undip.ac.id),  
[wijayanto@live.undip.ac.id](mailto:wijayanto@live.undip.ac.id)

**Departemen Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024)7465405  
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai fenomena kebangkitan dan kemunduran dinasti politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu yang bertahan selama 18 tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2018. Fenomena dinasti politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu merupakan cerminan dari lemahnya kekuatan partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai garda demokrasi terdepan dalam rekrutmen dan partisipasi masyarakat inklusif. Penelitian ini ditujukan guna menelaah sekaligus menemukan faktor-faktor penting dalam proses kebangkitan dinasti politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan guna menemukan faktor-faktor kemunduran dinasti politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebangkitan dinasti politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu secara konstruktif dipengaruhi oleh 3 faktor yakni *legacy* loyalis kader dan massa pendukung partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu, kemampuan dalam mengaktualisasikan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan corak budaya masyarakat Indramayu dan kemampuan dalam melakukan penyemaian jaringan. Selain itu, ditemukan pula bahwa kemunduran dinasti politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu disebabkan oleh 2 faktor yakni meninggalnya Irianto MS Syafiuddin dan terjadinya dualisme di tubuh partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu pada tahun 2020. Sebagai rekomendasi, tindakan reformis politik yang dilakukan oleh pimpinan partai politik terhadap politik kartel yang menjadi penyakit kepemimpinan di Kabupaten Indramayu merupakan semangat aktualisasi *check and balances* dalam mengantisipasi pemimpin dengan orientasi dinasti di masa depan.

**Kata Kunci:** Dinasti Politik, Partai Politik, Politik Kartel

### **Abstract**

*This research discusses the phenomenon of the rise and fall of the Irianto MS Syafiuddin political dynasty in Indramayu Regency which lasted for 18 years from 2000 to 2018. The phenomenon of the Irianto MS Syafiuddin political dynasty in Indramayu Regency is a reflection of the weak strength of political parties in carrying out their functions as the front line of democracy in the recruitment and participation of an inclusive society. This research is aimed at studying and finding important factors in the process of the revival of the political dynasty of Irianto MS Syafiuddin in Indramayu Regency. In addition, this research is also aimed at finding the factors of the decline of the political dynasty of Irianto MS Syafiuddin in Indramayu Regency. This study uses a qualitative descriptive method. Furthermore, this study uses data collection, namely interviews and documentation. As supporting data, this study uses a literature study. The data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion drawn.*

*The results of this study show that the rise of the political dynasty of Irianto MS Syafiuddin in Indramayu Regency is constructively influenced by 3 factors, namely the legacy of cadre loyalists and the masses of supporters of the Indramayu Regency Golongan Karya party, the ability to actualize leadership styles that are in accordance with the cultural patterns of the Indramayu community and the ability to seed networks. In addition, it was also found that the decline of Irianto MS Syafiuddin's political dynasty in Indramayu Regency was caused by 2 factors, namely the death of Irianto MS Syafiuddin and the occurrence of dualism in the body of the Indramayu Regency Golongan Karya party in 2020. As a recommendation, the political reformist actions taken by political party leaders against cartel politics that have become a leadership disease in Indramayu Regency are the spirit of actualization of checks and balances in anticipating leaders with a dynastic orientation in the future.*

**Keywords:** *Political Dynasty, Political Party, Cartel Politics*

## PENDAHULUAN

Dinasti politik merupakan sistem dalam demokrasi yang menekankan pada pelanggaran atas kekuasaan pemerintahan yang berlangsung dengan memberikan ruang yang luas kepada satu entitas manusia yang memiliki hubungan darah maupun kekerabatan yang dekat. Dalam prosesnya, politik dinasti bertransformasi menjadi salah satu sistem yang banyak diterapkan dan diusahakan terlaksananya melalui agenda politik dalam negara demokrasi. Selain itu, dinasti politik juga memiliki peranan yang sangat krusial dalam peta politik di Indonesia. Ini dikarenakan dengan semakin kuatnya dominasi dinasti politik di sejumlah daerah, tentu memiliki dampak yang konstruktif bagi eskalasi dan pengamanan agenda partisipasi politik bagi kemenangan pemilihan umum di tingkat nasional.

Hal ini dapat ditinjau dari eksistensi politik oleh Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang mana merupakan anak dan menantu dari presiden Joko Widodo yang naik menjadi Walikota Surakarta dan Walikota Medan. Dengan naiknya kedua anak dan menantu presiden tersebut, maka sudah dapat dikatakan bahwa kepemimpinan presiden Joko Widodo telah terimplementasikan adanya indikasi dinasti politik.

Banyak daerah yang terkontaminasi agenda politik dinasti melalui adanya proses rekrutmen yang melibatkan sanak keluarga dan kerabat, demi terlaksananya estafet kepemimpinan yang lebih lama. Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang mengalami proses dan implementasi politik dinasti yang bertahan hingga tahun 2019 dengan terpilihnya sang anak menjadi anggota DPD dan sanak kerabat lainnya (Effendi, 2018). Peta pembentukan politik dinasti di Provinsi Banten menurut Muhammad Al Fahjri Sukri (Sukri, 2020)

telah dikonstruksikan oleh sang ayah yakni Chasan Sohib yang merupakan pengusaha lokal di Banten yang merupakan salah satu aktor terbentuknya Provinsi Banten di masa dahulu. Secara teoritis, langkah yang ditempuh untuk membentuk kerajaan politik di Banten adalah mempergunakan logika aji mumpung dengan menempatkan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten selama dua periode yang kemudian diikuti oleh anak, menantu, dan cucunya yang kemudian menjadi pejabat eksekutif maupun legislatif di pemerintahan lokal. Dinasti politik yang terjadi di Provinsi Banten pun terjadi atas dasar untuk memperkuat pengaruh kepemimpinan yang berlandaskan pada penguasa atau jawara dan ulama tradisional, bukan berdasarkan *populism dynasties* yang terjadi di beberapa daerah lainnya seperti Bantul dan Kendal.

Provinsi Maluku Utara, pula menjadi daerah yang memiliki permasalahan yang cukup kompleks mengenai dinasti politik. Dimana terjadi dua kelompok dinasti yang memiliki pengaruh yang cukup untuk mempengaruhi potensi kemenangan suatu bakal calon yang akan memasuki bakal calon Gubernur Provinsi Maluku Utara. Dua kelompok ini merupakan barisan kelompok Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus yang memiliki kesamaan yang sepadan dalam menaruh sanak keluarga dalam jabatan legislatif, baik di tingkat kota maupun provinsi (Dafrin Muksin, 2019). Praktik dinasti politik di legislatif keduanya sebagai berikut:

Keluarga	Hubungan Keluarga	Jabatan Politik
Kasuba	Abdul Gani Kasuba	Anggota DPD RI periode 2004-2007, Wakil Gubernur tahun 2009-2014 dan Gubernur dua periode 2014-

		2024
	Muhammad Kasuba/adik Abdul Gani Kasuba	Anggota DPRD Maluku periode 1999-2001, Anggota DPRD Maluku Utara dua periode 2001-2005, Bupati Halmahera Selatan dua periode 2005-2010
	Bahrain Kasuba/keponakan Abdul Gani Kasuba	Ketua DPRD periode 2009-2014, Anggota DPRD Provinsi periode 2014-2015 dan Bupati Halmahera Selatan periode 2016-2021
Mus	Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPRD periode 2004-2005 dan Bupati Kepulauan Sula dua periode 2005-2015
	Aliong Mus/adik Ahmad Hidayat Mus	Bupati DOB Kepulauan Taliabu sejak 2016-2021
	Zainal Mus/adik Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPRD Sula periode 2009-2014 dan Bupati Banggai Kepulauan Periode 2017-2022)
	Alien Mus/adik Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPRD Malut periode 2014-2019 dan Anggota DPD RI 2019-2024

Sumber: *Dafrin Muhsin, 2019*

Dalam kacamata politis, hadirnya politik dinasti di Provinsi Maluku Utara dapat ditinjau dari empat faktor yakni faktor ekonomi, politik, kultural dan sosial. Dalam

faktor ekonomi, digambarkan bahwa Abdul Gani Kasuba yang mana merupakan Gubernur terpilih memiliki harta kekayaan mencapai Rp. 6.545.876.657,00 yang mana diantaranya berupa harta tanah dan bangunan sebesar Rp 5.380.000.000,00 alat transportasi dan mesin sebesar Rp 100.000.000,00 harta bergerak lainnya sebesar Rp.360.000.000,00 serta kas sebanyak Rp. 1.035.876.657,00 dan hutang senilai Rp 330.000.000,00. Namun, harta kekayaan yang dimiliki oleh Abdul Gani belum dapat menyaingi Ahmad Hidayat Mus yang memiliki permodalan yang lebih besar yakni Rp. 52.241.112.000,00. Kondisi ini mempengaruhi Abdul Gani memutuskan menggandeng Ali Yasin yang memiliki harta kekayaan 4 kali lipat di atasnya untuk mengimbangi modal ekonomi yang dimiliki.

Kedua, faktor politik. Faktor politik Abdul Gani terbentuk ketika Muhammad Kasuba memangku jabatan sebagai anggota DPRD Maluku yang berlanjut hingga menjadi Bupati Halmahera Selatan selama dua periode. Dengan modal politik tersebut, Abdul Gani memulai perjalanan menjadi anggota DPD RI hingga saat ini menjabat sebagai Gubernur sampai tahun 2024. Ketiga, faktor sosial. Abdul Gani dikenal melalui keterlibatan aktifnya saat berkunjung di pengungsian dengan memberikan bentuk-bentuk ceramah sebagai usaha untuk menenangkan rohaniah pengungsi pada saat konflik yang berkecamuk di Maluku Utara. Selain itu, Abdul Gani Kasuba dikenal sebagai seorang Dai, bahkan kerap dijuluki sebagai “Dai seribu pulau” hal itulah yang membuat dirinya begitu akrab dan dikenal luas masyarakat Maluku Utara.

Terakhir, faktor kultural. Secara umum, terdapat 28 suku yang tersebar di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara dengan Suku Togale (Tobelo-Galela) dan Makayoa (Makian-Kayoa) merupakan

suku mayoritas. Sebagai suku mayoritas, keduanya memiliki peran yang sangat menentukan kemenangan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku Utara. Abdul Gani Kasuba, sebagai lelaki kelahiran Tobelo, memiliki identitas kebudayaan sebagai masyarakat suku Togale (Tobelo-Galela) yang juga merupakan salah satu suku mayoritas di Maluku Utara. Hal itulah yang menjadi legitimasi yang kuat kemenangannya sebagai Gubernur.

Meninjau dari dua gambaran diatas mengenai dinasti politik, Kabupaten Indramayu memosisikan diri sebagai daerah yang mengimplementasikan konsep *Populisme Dynasties* yang merupakan suatu konsep dalam dinasti politik yang terbentuk atas dasar Figur merakyat dan program populis, menjaga status quo, dibentuk secara by incident. Konsepsi ini menjadi suatu perputaran yang menegaskan kekuasaan yang panjang selama 20 tahun dengan menempatkan keluarga Irianto M. S. Syafiuddin atau lebih dikenal sebagai Yance sebagai penguasa tunggal. Perputaran politik yang berkuat dalam satu keluarga ini, tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan kesuksesan Partai Golongan Karya (Golkar) dalam menancapkan pengaruhnya di Kabupaten Indramayu dengan mayoritasnya di kekuasaan legislatif.

Dalam periode kepemimpinan Yance yang bertahan selama 10 tahun, berhasil membangun prinsip-prinsip kekeluargaan yang biasa disebut klan dengan menempatkan tokoh-tokoh terdekat menjadi pucuk pimpinan dan anggota dalam pemerintahan (T.R, 2016). Selain itu, Yance juga mampu membangun konsolidasi kuat yang mengakar dalam tubuh partai dengan mengangkat tokoh-tokoh penting dalam partai sebagai anggota dalam organisasi pemerintahan dan membangun semangat solidaritas serta karismanya dalam menciptakan ruang kekeluargaan yang erat

antar anggota dan pengurus partai secara berkesinambungan.

Dalam proses politiknya ini, Irianto M.S. Syafiuddin atau Yance telah dipastikan tidak dapat mencalonkan diri menjadi calon Bupati Kabupaten Indramayu periode tahun 2010 hingga 2015 karena terbentur oleh UU No.10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam Pasal 162 dalam ayat 2 yang berbunyi "*Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan*". Oleh karenanya, untuk meneruskan estafet kepemimpinan yang terus dilegitimasi, diperlukan membentuk dan memilih calon potensial untuk meneruskan pengaruh kepemimpinan yang telah dibentuk secara konsisten.

Ketokohan Yance yang begitu kuat dalam tubuh Partai Golkar dan masyarakat Kabupaten Indramayu pada umumnya, menjadi modal besar bagi sang Istri, Hj. Anna Sophanah untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai Bupati Kabupaten Indramayu untuk tahun kepemimpinan 2010 hingga 2015. Hasilnya, dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 1.335.036, sekitar 841.315 merupakan hak suara penuh yang sah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indramayu tahun 2010, yang kemudian menempatkan pasangan Anna-Supendi sebagai urutan pertama dengan jumlah total suara mencapai 511.359 yang disusul oleh pasangan Gorry Sanury-Ruslandi dengan peroleh suara 11,33 persen dan Uryanto Hadi-Abas Abdul Jalil dengan peroleh suara 14,78 serta Api Karpi-Rawita dengan perolehan suara 5,36 persen, Mulyono Martono-Handaru dengan perolehan suara

2,10 persen, dan Toto Sucartono-Kasan Basari dengan perolehan suara 5,65 persen (Saefulloh, 2020).

Lebih lanjut, menurut Nanang Carsana (2020) menguraikan bahwa proses politik yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indramayu telah dapat diprediksi memenangkan pasangan Hj. Anna SophanahSupendi mengingat kuatnya pengaruh sosok Yance. Kuatnya pengaruh ini, didasarkan pada loyalitas dan kepercayaan yang tinggi masyarakat Indramayu kepada Yance. Selain itu, ada beberapa penyokong suara lainnya yang menjadi tumpuan bagi pasangan Hj. Anna Sophanah-Supendi untuk memenangkan kontestasi pemilihan didominasi oleh suara pemilih perempuan dengan menyumbang 673.220 suara.

Dalam periode selanjutnya, Hj. Anna Sophanah kembali mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Indramayu untuk periode 2015 hingga 2020 dengan menggandeng Wakil Bupati Indramayu sebelumnya yakni Supendi dengan koalisi partai yang meliputi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan terakhir adalah partai Nasional Demokrat (Nasdem) (Abdurahman, Maman, 2015).

Dalam keberjalanan kepemimpinan Hj. Anna Sophanah selama kurun waktu 8 tahun yang berlangsung antara tahun 2010 hingga 2018, perjalanan politik kekerabatnya telah memberi angin segar secara konsisten kepada suami dan anaknya. Untuk secara rincinya sebagai berikut:

No	Hubungan Keluarga	Jabatan Politik
1.	Irianto M.S Syafiuddin	Wakil Ketua DPRD Jawa Barat tahun 2014-2019
2.	Daniel Mutaqien	Anggota DPR

	Syafiuddin	RI tahun 2014-2019
--	------------	--------------------

Sumber: *Diolah oleh penulis*

Meninjau dari gambaran diatas, mengindikasikan adanya suatu fenomena dinasti politik yang akut dalam kepemimpinan Hj. Anna Sophanah. Selain itu, praktik dinasti yang terjadi juga melibatkan keterkaitan langsung dengan dinamika yang terjadi di dalam tubuh Aparatur Sipil Negara atau ASN yang dalam pelaksanaannya, politik bagi-bagi jabatan menjadi kondisi yang dinikmati ramairamai oleh beberapa Aparatur Sipil Negara atau ASN yang memiliki tendensi secara langsung dengan suksesi kepala daerah yang baru. Hal ini menjadi suatu agenda yang cukup konsisten setiap tahunnya, sehingga muncul asumsi bahwa permasalahan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Indramayu dalam hal ini Aparatur Sipil Negara atau ASN masih menjadi alat yang dipolitisasi dan diintervensi untuk menaikkan popularitas pihak-pihak yang berkepentingan (Suhendar, Riva Rachmi Kusumah, 2020).

Menginjak tahun 2020, terjadi pergeseran arus dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Indramayu dengan ditandai meninggalnya Irianto M.S. Syafiuddin atau Yance yang merupakan aktor politik utama dalam mengontrol keterpilihan dinasti politik keluarga dalam mempertahankan eskalasi suara dan mobilisasi massa. Dampak nyata yang ditimbulkan adalah kegagalan Daniel Mutaqien Syafiuddin atau sering disapa Daniel dalam mempertahankan eksistensi suara dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indramayu tahun 2020 dengan terpilihnya Nina Agustin Putri menjadi Bupati Kabupaten Indramayu periode 2021 sampai tahun 2026.

Berdasarkan uraian di atas penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor strategis dalam proses kebangkitan dan kemunduran Dinasti Politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu tahun 2000-2018.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Creswell (2016) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah berupa dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengarah pada studi kasus, fakta ataupun kejadian secara akurat dan sistematis terkait dengan daerah tertentu.

Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan karena dapat melihat dan memaknai suatu konsep dalam konteks dan kondisi apa adanya serta dapat menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai permasalahan yang akan diangkat peneliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk memberikan gambaran sekaligus mendeskripsikan mengenai proses kebangkitan dan kemunduran dinasti politik di Kabupaten Indramayu diimplementasikan pada rentang kepemimpinan tahun 2000 hingga 2018 oleh Irianto MS Syafiuddin.

Data dan informasi pada penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 7 (tujuh) narasumber, yaitu Daniel Mutaqien Syafiuddin selaku Anak Irianto MS Syafiuddin yang merupakan Anggota DPR RI periode 2014-2019, Hilal Himawan selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Wawang Iriawan selaku Ketua Pengurus

Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Yoga Rahardiansyah selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Indramayu, Tatang Sutardi selaku Mantan Direktur Utama PDAM Kabupaten Indramayu, Suhaeli Nawawi selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Wiralodra, dan Mulyono Martono selaku Camat Gabuswetan. Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan. Validasi penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan dilakukannya *cross check* hasil wawancara yang dibandingkan dengan narasumber lainnya agar di dapat data maupun jawaban yang jelas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dinasti politik merupakan frasa yang diartikan oleh sebagian besar masyarakat sebagai usaha secara sistematis yang ditujukan guna mempertahankan tampuk kekuasaan agar secara kontinu dikuasai oleh segelintir keluarga atau sanak famili. Dalam kesejarahan politik demokrasi di Indonesia, dinasti politik atau politik dinasti telah berkembang sekian banyak sanak famili yang tersebar di berbagai penjuru negeri, baik di tingkat desa, kabupaten atau kota hingga provinsi serta teranyar ditingkat nasional yakni Presiden dan Wakil Presiden. Kesemuanya ini, ditujukan guna melanggengkan kekuasaan yang belum usai di periode sebelumnya, untuk diteruskan di periode selanjutnya dengan menggunakan sanak famili sebagai kekuatan pendukungnya. Ini menjadi muatan demokrasi mengabaikan nilai-nilai etika dan esensial demokrasi.

Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin atau yang akrab dipanggil oleh kolega dan masyarakat Indramayu secara umum sebagai Yance merupakan mantan Bupati Kabupaten Indramayu yang memimpin dari tahun 2000 hingga tahun 2010 (dua periode). Sebagai

Bupati Kabupaten Indramayu, Yance bersama jajaran telah memberikan sumbangsih pemikiran dan pembangunan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Indramayu.

Dalam urusan kebijakan yang banyak dikeluarkan, terdapat beberapa produk kebijakan yang memiliki esensial penting bagi keberlanjutan masyarakat Indramayu. Produk kebijakan yang dimaksud antara lain kebijakan pembangunan infrastruktur yang masif dan pembangunan karakter yang dilakukan secara berjenjang dari awal masa menjabat sebagai bupati Indramayu pada tahun 2000 hingga tahun 2010.

Selain itu, dari sisi penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Yance melakukan mobilisasi pada percepatan masuknya anak-anak Indramayu yang memiliki potensi besar menjadi tokoh terbaik kabupaten Indramayu dengan menggelontorkan sejumlah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Indramayu guna membiayai proyek jangka panjang dalam pendidikan masyarakat. Salah satunya adalah pelaksanaan program akte berasuransi, supermotivasi, Kartu Indramayu Pintar, dan pembentukan sekolah unggulan.

Program akte berasuransi merupakan program yang diarahkan untuk memberikan bantuan pendidikan gratis yang ditujukan kepada anak-anak Indramayu yang memiliki kesulitan dalam mengakses pendidikan di masa itu. Program ini disasar pada tiap-tiap masyarakat yang memiliki anak dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga berpotensi kesulitan dalam membayar biaya pendidikan yang mahal. Jenjang pendidikan yang dijamin melalui program akte berasuransi ini adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah

Menengah Atas hingga Perguruan Tinggi dengan pemberian uang saku tambahan untuk menunjang kegiatan pembelajaran.

Program Supermotivasi merupakan program yang ditujukan guna mempercepat akselerasi pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa yang akan menyelesaikan pendidikan akhir di tingkat Sekolah Menengah Atas dengan dilakukan proses penyaringan sebelumnya, program ini ditargetkan menjadi kawah candradimuka yang strategis dalam mengembangkan potensi siswa Indramayu untuk dapat mengakses pendidikan di Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia, khususnya Perguruan Tinggi Negeri.

Program lainnya yang menjadi keberlanjutan dari pemerintahan Yance adalah pembentukan sekolah unggulan yang ditujukan untuk memberikan peluang bagi siswa Indramayu mengenyam pendidikan yang unggul sehingga diharapkan mampu bersaing dengan siswa seluruh Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, program ini merupakan bentuk disrupsi yang dilihat oleh Yance dengan meninjau dari adanya regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang mengatur mengenai tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Program ini berjalan sepanjang periodisasi Yance menjabat hingga dilanjutkan oleh sang Istri yakni Anna Sophanah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menerangkan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada rentang tahun 2010 hingga tahun 2018, Kabupaten Indramayu selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut sebagai berikut:

No	Nama Wilayah	Tahun	IPM
1	Kabupaten	2010	60,86



	Indramayu		
2	Kabupaten Indramayu	2011	61,47
3	Kabupaten Indramayu	2012	62,09
4	Kabupaten Indramayu	2013	62,98
5	Kabupaten Indramayu	2014	63,55
6	Kabupaten Indramayu	2015	64,36
7	Kabupaten Indramayu	2016	64,78
8	Kabupaten Indramayu	2017	65,58
9	Kabupaten Indramayu	2018	66,36

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS)*

Secara umum, Indikator Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas empat macam yakni Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan. Dengan terpenuhinya keempat indikator ini, maka dapat dikatakan secara langsung bahwa suatu daerah atau negara telah dikatakan memiliki kualitas hidup yang sangat baik. Hal ini juga sejalan dengan adanya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu pada akhir tahun Yance menjabat yang kemudian bergerak positif di masa sang istri menjabat pada rentang tahun 2010 hingga tahun 2018, dapat dikatakan membawa Indramayu ke arah optimalisasi pembangunan yang komprehensif.

## **1. Faktor Kebangkitan Dinasti Politik Irianto di Kabupaten Indramayu**

### **1.1. Legacy Partai Golongan Karya di Kabupaten Indramayu**

Dalam eksistensi Partai Golongan Karya (Golkar), Indramayu merupakan daerah yang selalu menjadi basis suara terbanyak dan terdepan dalam

menyumbangkan suaranya bagi Partai Golongan Karya (Golkar) di nasional. Hal ini tidak mengherankan jika nama Yance menjadi tokoh yang memiliki popularitas di ranah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Dalam tatanan historis, partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indramayu telah bermetamorfosis menjadi partai yang paling dominan pada masa Orde Baru, hal ini dipengaruhi oleh perolehan kursi parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu yang didominasi partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu dan utusan ABRI. Hal ini tidak mengherankan bahwa diawal tahun 2000-an, massa organik yang secara konsisten memilih partai Golkar di masa Orde Baru, menjatuhkan pilihannya kepada partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indramayu dan Yance sebagai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indramayu tahun 2005.

Realitas sejarah ini kemudian berputar signifikan dengan adanya pemilihan umum tahun 1999 yang membawa partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu memperoleh 10 kursi dari 50 kursi yang tersedia di parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu. Namun, dengan kondisi yang demikian, pada proses pemilihan kepala daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Indramayu yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2000 menjadi bola panas yang menjadi isu strategis di Kabupaten Indramayu. Partai Golkar bersama partai PDIP secara bersamaan mencalonkan masing-masing jagoannya untuk menduduki jabatan strategis di Kabupaten Indramayu ini dengan realita di lapangan bahwa secara proporsional anggota parlemen yang menduduki jabatan sebagai anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu yang

berasal dari partai PDIP merupakan yang paling dominan dengan 25 kursi.

Kondisi yang secara hitung-hitungan politik tentu tidak menjadi kondisi yang mudah bagi partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu, mampu dituntaskan dengan manis oleh Yance yang pada saat mencalonkan diri pada pemilihan Bupati Indramayu secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu bergandengan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diberikan posisi sebagai wakil Bupati Indramayu yang dalam hal ini diemban oleh Dedi Wahidi.

Pada prosesnya, Yance berhasil secara persuasif dalam melobi beberapa partai yang memiliki kursi di parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu untuk memilih dirinya serta menarik beberapa anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu yang berasal dari partai PDIP untuk memilih dirinya dalam proses pemungutan yang dilakukan secara tertutup. Proses dan kondisi yang terjadi ini, menjadikan Yance berhasil menjadi Bupati Indramayu periode tahun 2000 hingga tahun 2005 dengan didampingi oleh Dedi Wahidi dengan total suara yang masuk adalah 25 suara. Sementara calon Bupati yang diusung oleh PDIP hanya memperoleh 17 suara saja. Dengan hasil tersebut, maka secara sah Yance dan Dedi Wahidi dikukuhkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu terpilih pada tahun 2000.

Pada masa kepemimpinan Yance – Dedi Wahidi, Kabupaten Indramayu diarahkan sebagai kabupaten yang islamis dan berdaya secara ekonomi, hal ini sesuai dengan gagasan yang tertuang melalui visinya yakni Indramayu Remaja yang merupakan akronim dari Religius, Maju, Mandiri dan

Sejahtera. Melalui visi ini, Yance melakukan berbagai langkah yang konkret dalam membangun Indramayu baik dari sisi pembangunan fisik maupun pembangunan manusia. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Hilal Himawan yang merupakan anak dari Yance, yang secara jelas menyebutkan bahwa Yance merupakan sosok pemimpin yang mampu memberikan jawaban atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indramayu secara umum.

Hal yang paling sederhana adalah pembangunan betonisasi yang secara massif dilakukan oleh Yance baik di masa periode pertama dan kedua yang kemudian dilanjutkan oleh sang Istri, Anna Sophanah. Dampak yang paling ketara adalah adanya kepuasan dari masyarakat mengenai aksesibilitas jalan yang mulai membaik sehingga membantu memperlancar kegiatan ekonomi dan aktivitas mobilitas yang dilakukan sehari-hari. Selain itu, dalam bidang kesehatan, Yance melakukan proses pembangunan yang fundamental dibutuhkan oleh masyarakat adalah pembangunan Rumah Sakit. Berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sentot yang berlokasi di kecamatan Patrol ini merupakan aspirasi yang paling mendesak mengingat belum adanya fasilitas kesehatan yang memadai di daerah Indramayu bagian barat. sehingga pembangunan ini membawa dampak yang positif dalam menaikkan rasio harapan hidup masyarakat Indramayu.

Kemajuan dari berbagai sektor ini menjadikan kepemimpinannya sebagai bupati Indramayu di masa periode pertama, mendapatkan respon yang positif dan membawa dampak kepuasan yang konsisten. Akar rumput yang militan, menjadi basis massa yang paling berperan penting dalam proses pemenangan Yance di pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten Indramayu pada tahun 2005.

## **1.2. Gaya Kepemimpinan Irianto MS Syafiuddin**

Gaya kepemimpinan yang dimanifestasikan Yance dalam memimpin Kabupaten Indramayu pada rentang tahun 2000 hingga tahun 2010 dan partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu adalah gaya kepemimpinan paternalistik sekaligus kharismati. Melalui gaya kepemimpinan ini, Yance secara konstruktif membentuk dan mengarahkan kepemimpinan serta percaturan politik Kabupaten Indramayu kedalam arena politiknya sendiri. Hal inilah yang pada akhirnya membawa dia dan keluarganya menjadi keluarga politik yang paling berpengaruh dalam jenjang trah kepemimpinan Kabupaten Indramayu, kelegislatifan di Kabupaten Indramayu dan Jawa Barat hingga berhasil menjadikannya sebagai orang yang dianggap baik oleh masyarakat Indramayu secara umum.

## **1.3. Penyemaian Jaringan Suara**

Yance secara konstruktif membangun kendali atas masyarakat Indramayu telah dimulai ketika Yance mengambil komando atas beberapa organisasi massa yang saat itu memiliki keanggotaan yang besar dan militan. Perjalanan karir di organisasi kepemudaan dan masyarakat secara umum ini dimulai dari perannya sebagai ketua Pemuda Pancasila selama tiga periode yang dimulai pada tahun 1987. Peranannya ini mulai memanjang dengan terpilihnya Yance sebagai ketua BPC HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) pada rentang tahun 1990 hingga 1993. Kemudian Yance terpilih kembali menjadi ketua BPC GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) pada tahun 1997 dan Ketua DPD Organda (Organisasi Angkutan Darat) pada tahun yang sama serta yang paling mempengaruhi kilatan karir Yance di dunia sosial masyarakat adalah terpilihnya

Yance sebagai ketua FKDPM atau Forum Komunikasi Daerah Penghasil Minyak.

Dengan hadirnya model labour supplier ini menjadi pendorong strategis bagi Yance untuk menerima kepercayaan yang lebih luas dari masyarakat karena dia dianggap sebagai orang yang mampu membawa kesejahteraan bagi sebagian masyarakat Indramayu yang dibawa dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Kondisi ini mengantarkan pada kesuksesannya dikemudian hari ketika mencalonkan diri menjadi bupati Kabupaten Indramayu pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten Indramayu tahun 2005 secara langsung serta secara kontinu membantu partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu secara konsisten menjadi partai yang paling dipilih oleh masyarakat Indramayu guna menyalurkan aspirasinya dengan naiknya kursi parlemen anggota legislatif yang berasal dari partai Golkar secara konsisten setiap pemilihan legislatif dan umum dilaksanakan.

Selain itu, pengalaman Yance diorganisasi sebelumnya seperti Pemuda Pancasila, HIMPI, GAPENSI, dan Organda menjadikan Yance sebagai kader paling berpengaruh yang dimiliki oleh partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu karena tiap-tiap anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu secara interpersonal memiliki keterkaitan satu sama lain karena anggota legislatif ini merupakan kader Yance ketika masih berada di organisasi massa yang telah dibina secara kontinu diawal tahun 1980 hingga 1990 an. Yang oleh karenanya, pada saat proses kontestasi pemilihan kepala daerah dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Indramayu, Yance dengan kekuatan jaringan yang telah disemai sebelumnya berhasil merengkuh suara mayoritas.

## **2. Faktor Kemunduran Dinasti Politik Irianto di Kabupaten Indramayu**

Dinamika kemunduran dinasti politik Irianto MS Syafiuddin di Kabupaten Indramayu juga pada akhirnya memiliki berbagai muatan peristiwa dan fenomena yang mengiringi tahun-tahun pengakhirannya. Dinasti yang telah berkuasa di Kabupaten Indramayu selama 18 tahun lamanya, menjadikannya sebagai keluarga yang paling berpengaruh pada eskalasi perpolitikan, baik di skala regional bahkan hingga nasional. Dinamika-dinamika yang dimaksud diuraikan dengan dua peristiwa yakni kematian Irianto MS Syaifuddin atau Yance pada tahun 2020 dan Dualisme partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indramayu yang ditandai dengan tarik ulur kekuasaan yang dilakukan oleh Syaefudin beserta pendukungnya melawan Daniel Mutaqien Syafiuddin sebagai ketua umum DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indramayu terpilih sebelumnya.

### **2.1. Hilangnya tokoh sentral Irianto MS Syafiuddin**

Meski pernah menjadi tahanan pada tahun 2016 karena tersandung kasus tindak pidana korupsi pembebasan lahan yang dikemudian hari digunakan sebagai lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pengaruh dan ketokohan Yance benar-benar hilang dan berdampak besar bagi eksistensi partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indramayu dan sang anak yakni Daniel Mutaqien Syafiuddin yang pada tahun 2020 mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Indramayu untuk periode 2021 – 2026 kandas, ditandai dengan berita duka kematiannya pada tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu.

Menurut data yang diperoleh dari kesekretariatan Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indramayu, ketua DPD

Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indramayu terpilih dalam musyawarah sebelumnya adalah Daniel Mutaqien Syafiuddin menjadikan kedua tokoh ini memiliki gesekan politik yang hangat, yang pada akhirnya pula memiliki konsekuensi luas kepada seluruh kader Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indramayu terpecah, baik dari sisi konsentrasi hingga pembelahan orientasi dukungan pada calon Bupati Indramayu di tahun 2020.

### **2.2. Dualisme Partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu**

Sesuai hasil musyawarah daerah tahun 2015, Daniel Mutaqien Syafiuddin ditetapkan sebagai Ketua Umum DPD partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu periode 2015 hingga 2020. Pada masa Daniel menjabat, terjadi konsolidasi politik yang relatif cair di internal partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu dengan tetap dipertahkannya kursi parlemen yang diisi oleh aleg partai golkar Indramayu di DPRD Indramayu di angka 24 kursi. Kondisi ini membawa partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu memiliki kans lebih besar dalam membawa kursi eksekutif di pilkada tahun 2020.

Namun, kondisi ini mengalami pergeseran dinamika yang berjalan secara kompleks dan dramatis. Hal ini ditandai dengan adanya proses perebutan jabatan sebagai ketua DPD partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu yang diwarnai dengan aksi pemboikotan kepengurusan yang sah dan dilakukannya musyawarah partai tandingan yang dilaksanakan secara sistematis dengan berdasar pada aspirasi kader partai partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu.

Selain itu, faktor lainnya yang menjadi pemicu terjadinya dualisme internal partai

Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu ini adalah hilangnya ketokohan dan figur pemersatu partai yang dalam hal ini adalah Yance yang secara konsisten berhasil menjaga keutuhan partai dengan efektifitas kebijakan partai dan pemerintahan Indramayu selama menjabat. Selain itu, dengan adanya kewajiban moral dan hutang budi yang dimiliki oleh kader partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu kepada Yance, menjadikannya sebagai tokoh dan figure yang paling dihormati dan disegani.

Dengan terjadinya proses dualisme partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu yang diawali dengan dilaksanakannya musyawarah daerah (Musda) kesepuluh pada tanggal 16 Juli 2020 yang memenangkan Syaefudin sebagai ketua DPD partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu. Kondisi ini membawa partai golkar berada pada dualisme kepemimpinan yang pada saat yang sama masih berada ditangan Daniel Mutaqien Syafiuddin sebagai ketua DPD partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu yang terpilih pada periode sebelumnya. Pada tahap selanjutnya, Daniel Mutaqien Syafiuddin dan para loyalis, melaporkan peristiwa ini ke mahkamah partai guna mendapatkan titik temu yang konkret dalam menengahi permasalahan yang tengah terjadi.

Dengan disahkannya Musyawarah partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu oleh Mahkamah Partai Golkar pada tanggal 22 Juni 2020, maka ini merupakan titik balik dari serangkaian proses kemunduran partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati Indramayu tahun 2020. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh pak Tatang bahwa konsekuensi logis fenomena dualisme hingga memaksa Daniel untuk turun dari

jabatannya sebagai Ketua DPD partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu adalah pembelahan loyalis partai dan pecahnya konsolidasi partai dalam memenangkan kontestasi, baik pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024. Kondisi ini ditujukan dengan kekalahan partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu yang dalam hal ini diwakili oleh pasangan Daniel-Taufik dalam memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Indramayu pada tahun 2020 dan menurunnya kursi anggota legislatif partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu (DPRD Indramayu) pada pemilu 2024 menjadi 14 kursi dari semula berjumlah 22 kursi pada pemilihan umum tahun 2019. Ini menjadi perolehan terendah selama pemilu demokratis pasca reformasi yang dimulai pada tahun 1999.

## **KESIMPULAN**

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti menarik kesimpulan dan saran dengan berlandaskan pada temuan hasil penelitian. Peneliti menyimpulkan kebangkitan dinasti politik Irianto M.S. Syafiuddin di Kabupaten Indramayu tahun 2000 - 2018 disebabkan oleh tiga faktor kunci yakni, pertama, kemampuan dalam melakukan penyemaian jaringan. Irianto M.S. Syafiuddin mengembangkan jaringannya di Kabupaten Indramayu dengan menduduki jabatan yang strategis di organisasi kepemudaan dan masyarakat seperti ketua BPC GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional

Indonesia) pada tahun 1997 dan Ketua DPD Organda (Organisasi Angkutan Darat) pada tahun yang sama serta signifikansi Irianto M.S. Syafiuddin di dunia sosial masyarakat adalah terpilihnya Irianto M.S. Syafiuddin sebagai ketua FKDPM atau Forum Komunikasi Daerah Penghasil Minyak. Sebagai ketua FKDPM, Irianto M.S. Syafiuddin menjadi penghubung tenaga kerja Kabupaten Indramayu untuk disalurkan pada pertambangan minyak dan gas (migas). Kondisi inilah yang mengantarkan Irianto M.S. Syafiuddin memperoleh kepercayaan dari masyarakat karena Irianto M.S. Syafiuddin dianggap mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indramayu.

Kedua, *legacy* loyalis kader dan massa pendukung partai Golkar Kabupaten Indramayu. Partai Golkar Kabupaten Indramayu selalu mendapatkan sentimen yang positif dari masyarakat Kabupaten Indramayu secara umum dengan perolehan kursi Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Indramayu yang berasal dari partai Golkar selalu memperoleh suara sebesar 30 hingga 32 kursi setiap pemilihan umum dilaksanakan. Ketiga, kemampuan dalam mengaktualisasikan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan corak budaya masyarakat Indramayu. Dalam kampanye

positif di akar rumput, Irianto M.S. Syafiuddin dan Anna Sophanah melancarkan kampanye psikologis melalui agenda kunjungan ke masyarakat, baik kunjungan formal maupun informal seperti menghadiri acara hajatan masyarakat Indramayu tanpa melihat latar belakang dan bersepeda mengelilingi Indramayu pada saat menjelang subuh untuk memverifikasi hasil pengerjaan kebijakan yang telah diluncurkan sekaligus menyapa masyarakat.

Lebih lanjut, peneliti menyimpulkan terdapat 2 faktor kemunduran dinasti politik Irianto M.S. Syafiuddin di Kabupaten Indramayu tahun 2000 – 2018 yakni, pertama, meninggalnya Irianto MS Syafiuddin. Irianto MS Syafiuddin merupakan aktor kunci sekaligus pemersatu kepentingan golongan di Kabupaten Indramayu menjadi katalisator sekaligus dalam mempertahankan kestabilan partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu untuk berkedudukan di jabatan strategis eksekutif sebagai Bupati Indramayu dan mayoritas parlemen di DPRD Kabupaten Indramayu. Hilangnya tokoh utama dalam sistem patronase secara langsung berdampak pada tergerusnya sistem yang telah berjalan tersebut sehingga mempengaruhi subjek dan objek yang berada dalam porosnya. Salah satu pengaruh paling signifikan yang

dirasakan adalah pecah kongsi internal partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu dalam pemilihan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang baru dan arah gerak loyalis partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu dalam memobilisasikan diri memenangkan pasangan Daniel – Taufik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indramayu tahun 2020 yang menemui hambatan sehingga menggagalkan pasangan ini menjadi Bupati Kabupaten Indramayu dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu terpilih untuk periode tahun 2020-2025.

Kedua, terjadinya dualisme di tubuh partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu pada tahun 2020. Dengan terjadinya proses dualisme partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu yang diawali dengan dilaksanakannya musyawarah daerah (Musda) kesepuluh pada tanggal 16 Juli 2020 yang memenangkan Syaefudin sebagai ketua DPD partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu. Dengan disahkannya Musyawarah partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten Indramayu oleh Mahkamah Partai Golkar pada tanggal 22 Juni 2020, maka ini merupakan titik balik dari serangkaian proses kemunduran partai Golongan Karya (Golkar) kabupaten

Indramayu di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati Indramayu tahun 2020.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian, pola dinasti politik di Kabupaten Indramayu digagas dan dimunculkan sejak era transisi reformasi dilakukan, hal ini yang menjadikannya kuat dan terorganisir secara strukturalis dan jaringan. Oleh karenanya, dibutuhkan metode reformis yang dilakukan oleh pihak oposisi dalam hal ini adalah partai politik lawan yang berada di lingkungan Kabupaten Indramayu untuk secara proaktif membentengi diri dan melakukan agitasi dalam menahan keberadaan politik dinasti tetap bercokol dalam waktu yang lama di Kabupaten Indramayu. Meski pada tahun 2020 telah terjadi peralihan Bupati Kabupaten Indramayu dari petahana dalam hal ini adalah partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu yang digeser kepemimpinannya oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, kondisi ini ternyata belum mampu menandingi kualitas kepemimpinan sebelumnya ditunjukkan dengan adanya beberapa isu seperti perseteruan dengan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu dan pemangkatan jabatan sebagai Bupati Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Indramayu (DPRD Indramayu) melalui penggunaan hak angket dan interpelasi sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan masyarakat kepada kepemimpinan Nina Agustina.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adler, P. A., & Adler, P. (2009). Teknik-teknik observasi. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ANINDA, R. D. A. R. D. (2013). PELANGGENGAN DINASTI POLITIK 'SAMAWI'SEBUAH STUDI PERILAKU PEMILIH MODEL PSIKOLOGIS DALAM PILKADA BANTUL TAHUN 2010. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(2), 15-28.
- Armstrong, M. (2006). *Strategic human resource management*.
- Azhar, M. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *Notarius*, 8(2), 274-286.
- Bathoro, A. (2011). Perangkap dinasti politik dalam konsolidasi demokrasi. *Jurnal Fisip Umrah*, 2(2), 115-125.
- Brahmasari, I. A., & Suprayetno, A. (2008). Pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan serta dampaknya pada kinerja perusahaan (Studi kasus pada PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia). *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 10(2), 124-135.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 5.
- Darmansyah, R., Syahrani, S. D., & Harirah, Z. (2020). Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif. *Journal of Political Issues*, 2(1), 34-46.
- Dubrin, A. J. (2005). *Leadership* (terjemahan). Edisi Kedua. Prenada Media. Jakarta.
- Effendi, W. R. (2018). *Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten*. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233-247.
- Fadiyah, D., Dewi, R. K., & Karyana, A. (2022). Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan. *Journal of Political Issues*, 4(1), 19-28.
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 91-111.
- Hasan, M. I. (2002). Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya.
- Hidayati, N. (2014). Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 10(1).
- Kartiwan, I. (2022). KEJATUHAN POLITIK DINASTI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA (STUDI KASUS KEKALAHAN PASANGAN ALI BASRAH-DENNY FEBRIAN ROZA PADA PILKADA 2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(1).
- Khaerunisah, I., Japar, M., & Suhadi, S. (2018). BUDAYA POLITIK PEREMPUAN PESISIR: STUDI PERILAKU POLITIK PEREMPUAN DI KABUPATEN INDRAMAYU. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(2), 134-154.
- Krisdinanto, N. (2014). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 189-206.
- Long, T. K., & Boediningsih, W. (2023). Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya Secara Langsung di Indonesia. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 1875-1883
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). *Designing qualitative research*. Sage publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Analisis data kualitatif*. terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.



- Mudhoffir, A. M. (2014). Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 75-100. Muksin, D., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2019). Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi: Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 4(2), 133-144.
- Najaha, S. (2021). Partai Nasionalis Dan Akomodasi Politik: Studi Atas Kegiatan Keagamaan Pdi Perjuangan Di Indramayu, Jawa Barat (2014- 2020) (Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta).
- Siagian, S. P. (2008). Manajemen sumber daya manusia.
- Primadi, A., & Purwaningsih, T. (2019). Institusionalisasi Partai Politik Dalam Pilkada 2017 (Studi Kasus: Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Journal of Government and Civil Society*, 3(1), 63-78.
- Rahmatunnisa, M. (2021). Menyoal Politik Kekerabatan di Indonesia dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 4(2), 295-316.
- Ridha, M. (2016). Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 160-182.
- Sidel, J. T. (1998). Macet total: Logics of circulation and accumulation in the demise of Indonesia's New Order. *Indonesia*, (66), 159-195.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Suharto, D. G., Nurhaeni, I. D. A., Hapsari, M. I., & Wicaksana, L. (2017). Pilkada, politik dinasti, dan korupsi. In *Pertemuan Forum Dekan IlmuIlmu Sosial PTN Se-Indonesia*.
- Suhendar, S., & Kusumah, R. R. (2020). Penanganan Pelanggaran Serta Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Pencipta Iklim Kondusif Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Yustitia*, 6(1), 108-118.
- Sukri, M. A. (2020). Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 169-190.
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111-119.
- Syarifudin, E. (2004). Teori Kepemimpinan. *Al Qalam*, 21(102), 459-477
- Tristana, R. W., & Priyatno, H. (2017). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Periode 1989- 2017 (Analisis Implikasi Sosial dan Politik). *Journal of Politic and Government Studies*, 6(03), 121-130
- Karyudi Sutajah Putra dalam Suara Merdeka “Kompetisi Politik Dinasti”, tanggal 18 Oktober 2013.
- Kompas.com. (2010). Pasangan Anna – Supendi Tak Tergoyahkan. <https://nasional.kompas.com/read/2010/08/19/13152555/~Regional~Jawa>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2024.
- Nurita, Dewi. (2020, Januari 1). ICW Tuding Gubernur Riau sedang Bangun Dinasti Politik. Retrieved Maret 9, 2020, from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1293792/icw-tuding-gubernur-riau-sedangbangundinasti-politik>.